

Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Penerimaan Pajak dan Ekspor Terhadap Perekonomian di Asia Pasifik

Dwi Mahriun^{1*}, Dewi Zaini Putri²

^{1,2} Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: dwimahriun@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

11 Juli 2020

Disetujui:

25 Agustus 2020

Terbit daring:

01 September 2020

Sitasi:

Mahriun, D, & Putri, D, Z.
(2020). Pengaruh Tata Kelola
Pemerintahan, Penerimaan
Pajak dan Ekspor Terhadap
Perekonomian di Asia Pasifik.
JKEP: Jurnal kajian ekonomi
dan pembangunan, 2(3),

Abstract

This Study aims to examine and to analysis how the effect of governance, tax revenue and export on economy in Asia Pasific, the variables that used are control of corruption (X1), political stability (X2), tax revenue (X3), expor (X4) and economy (Y). The data used is panel data during the period 2010-2017, and sourced by data documentation and review of literature obtained from relevant institutions and agencies. This study using the panel data regression approach with the object of several developed and developing countries. The study found that: (i) control of corruption, tax revenue and export have a significant effect on economy, (ii) political stability have a insignificant effect on the economy, (iii) and simultaneously all of the independent variables in this study have a significant effect on the economy.

Keywords: Governance, Tax Revenue, Economy, and Panel Data Regression

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis bagaimana pengaruh tata kelola pemerintahan, penerimaan pajak dan ekspor terhadap perekonomian di Asia Pasifik. Variabel yang digunakan adalah control of corruption (X1), political stability (X2), penerimaan pajak (X3), ekspor (X4) dan perekonomian (Y). Data yang digunakan merupakan data panel dari tahun 2010-2017, dan dikumpulkan melalui dokumentasi data dan studi pustaka yang diperoleh dari lembaga dan agensi terkait. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan objek beberapa negara maju dan negara berkembang.

Penelitian ini menemukan bahwa: (i) control of corruption, penerimaan pajak dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap perekonomian, (ii) political stability tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian, (iii) dan secara simultan semua variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap perekonomian.

Kata Kunci : Tata kelola pemerintahan, Penerimaan Pajak, Perekonomian dan Regresi Data Panel.

Kode Klasifikasi JEL: O16, E02

PENDAHULUAN

Keberhasilan dan perkembangan perekonomian suatu negara, secara umum diukur berdasarkan besaran atau tingkat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan GDP, baik GDP riil maupun GDP nominal dalam periode waktu tertentu serta kemampuan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa pada masyarakat. Perekonomian dengan peningkatan produksi barang dan jasa menjadi target pembangunan yang penting, sebab hal ini dikarenakan secara implisit mencakup segala kinerja ekonomi, diantaranya tingkat investasi, penyerapan tenaga kerja, jumlah output serta pendapatan nasional. Perekonomian di kawasan Asia Pasifik memiliki kekuatan dan potensi ekonomi besar seperti Jepang, China, Korea Selatan, Singapura dan Thailand. Serta memiliki prospek ekonomi yang baik dan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan paling dinamis dalam ekonomi global.

Data terbaru Grant Thornton (Asia-Pacific: trading and thriving) telah mencatat bahwa pergerakan ekonomi di negara ini tumbuh positif. Hal ini juga diperkuat dengan meningkatnya perdagangan di negara tersebut sehingga memberikan peluang besar dalam meningkatkan perekonomiannya. Menurut IMF (2018), prospek ekonomi di kawasan Asia Pasifik cukup kuat dan kawasan ini merupakan kawasan paling dinamis dalam ekonomi global, prospek ekonomi yang Jepang, pertumbuhan ekonominya selama dua tahun terakhir terus meningkat hingga mencapai 1,2% pada tahun 2018. Artinya kegiatan perekonomian di negara tersebut dalam keadaan yang baik. Selain itu, ekonomi di kawasan Asia Pasifik mencapai titik tertinggi selama dua tahun terakhir (2017 dan 2018) yang tergambar dari level optimisme bisnis yaitu di angka 41%. Kemudian adanya perang dagang yang dilakukan negara-negara maju untuk merebut pasar Asia Pasifik mengindikasikan bahwa kawasan ini sudah mulai menjadi pusat perekonomian dunia.

Perekonomian sebagai wujud atas kegiatan ekonomi suatu negara selalu menjadi faktor utama yang menunjukkan apakah negara tersebut berhasil dalam menjalankan kegiatan ekonominya atau tidak. Dimana dalam kegiatan perekonomian tersebut dibutuhkan sumbangsih peran dari berbagai pihak terutama pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka dapat merancang dan menetapkan kebijakan yang mana nantinya akan meningkatkan perekonomian negaranya.

Menurut Kim (2018) *governance* dan *government size* berpengaruh terhadap perekonomian, artinya *governance* (tata kelola pemerintahan) dan *government size* (pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak) memberikan dampak terhadap menurun atau meningkatnya perekonomian suatu negara. Tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap perekonomian, artinya tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara tergantung seberapa baik atau buruk kualitas pemerintahannya (Gaol, 2016).

Stoilova (2016) bahwa pajak konsumsi, pajak perorangan dan pajak properti juga dapat mendorong peningkatan perekonomian. Perpajakan suatu negara apabila dikelola dan diterapkan secara baik dan disiplin maka akan menjadi ladang pendapatan negara tersebut. Khususnya bagi negara yang berjumlah penduduk tinggi dan memiliki pendapatan perkapita yang tinggi. Sehingga wajib pajak yang diberlakukan untuk setiap jenis properti maupun penghasilan perorangan dapat menunjang kegiatan perekonomian di suatu negara.

Perekonomian juga dapat didorong dengan peningkatan devisa negara, devisa negara dapat diperoleh dengan melakukan ekspor, yaitu menjual barang maupun jasa ke negara lain. Ekspor memiliki pengaruh yang positif terhadap perekonomian (Ginting, 2017). Artinya perdagangan internasional merupakan salah satu cara dalam meningkatkan perekonomian.

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian perlu dilakukan sebab apabila perekonomian tidak dikendalikan dengan kebijakan dan peraturan akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang akan berakhir pada kerugian negara. Sebagai contoh, di Indonesia sudah banyak isu yang berkaitan mengenai barang yang lolos pajak, artinya pemerintah belum melakukan pengetatan terhadap barang yang masuk atau pendaftaran terhadap barang tersebut di perpajakan. Selain itu, juga masuknya barang ilegal yang tidak dikenakan bea cukai. sehingga apabila hal ini semakin dibiarkan akan menghambat perekonomian suatu negara.

Sebuah penelitian yang menemukan bahwa *political stability* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap perekonomian, sementara *control of corruption* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perekonomian (Omoteso & Mobolaji, 2014). Sementara bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya bahwa terdapat hubungan yang negatif antara *political stability* dan perekonomian (Kandil, 2009). Berdasarkan dua penelitian tersebut dapat dilihat bahwa indikator *good governance* dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap perekonomian. Karena indikator *good governance* diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemerintah, dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan

produksi barang dan jasa. Sehingga perlu diketahui sejauh mana dampak yang diberikan indikator good governance ini terhadap perekonomian. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pengaruh good governance terutama control of corruption dan political stability of absence and violence terhadap kondisi perekonomian di 11 negara Asia Pasifik, serta bagaimana pengaruh penerimaan pajak dan ekspor terhadap perekonomian.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari *World Bank* dari tahun 2010-2017. Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan satuan indeks, Penerimaan Pajak diukur dengan US Dollar, Ekspor diukur dengan US Dollar dan Perekonomian diukur dengan US Dollar.

Metode yang digunakan adalah metode regresi panel yang memiliki 3 model yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)* dan dipilih melalui 3 uji pemilihan model yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Langrange Multiplier. Pada Uji Chow, memilih antara FEM atau CEM (prob. < 0,05 = FEM), Uji Hausman, memilih antara FEM atau REM (prob. < 0,05 = FEM), dan Uji LM, memilih antara REM atau CEM (prob. < 0,05 = REM). Apabila pada Uji Chow sudah terpilih FEM maka tidak perlu dilanjutkan ke Uji LM dan dilanjutkan ke Uji Asumsi Klasik.

Berikut adalah model analisis regresi panel dalam penelitian ini:

$$\text{Log_Y}_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \text{Log_}\beta_3 X_{3it} + \text{Log_}\beta_4 X_{4it} + U_{it} \quad (1)$$

Dimana, Y_{it} adalah perekonomian, X_{1it} adalah *Control of Corruption*, X_{2it} adalah *Political Stability and Absence of Violence*, X_{3it} adalah Penerimaan Pajak, X_{4it} adalah Ekspor, U_{it} adalah *Error term*, I atau n adalah *Cross-section*, dan t adalah *Time Series*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Control of Corruption terhadap Perekonomian di Asia Pasifik

Berdasarkan hasil estimasi control of corruption memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di 11 negara Asia Pasifik. Artinya, ketika pengendalian korupsi oleh pemerintah di Asia Pasifik ditingkatkan maka perekonomian akan meningkat. Korupsi merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat perekonomian, sehingga dibutuhkan lembaga untuk mengurangi dan menekan serta mengendalikan tindak korupsi. Selain memberantas dan mengendalikan korupsi, suatu lembaga melakukan pengawasan terhadap lembaga atau instansi negara, terutama terhadap bagian keuangannya. Pengawasan sebagai salah satu cara pengendalian korupsi akan meminimalisir tindakan korupsi yang dapat terjadi. Semakin ketatnya pengawasan maka korupsi juga akan semakin berkurang. Berkurangnya korupsi tersebut akan berdampak baik terhadap kegiatan perekonomian.

Secara teori, apabila indeks indikator ini meningkat maka akan meningkatkan perekonomian. Sejalan dengan hasil estimasi dan teori, hal serupa juga telah ditemukan oleh Spiteri (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa control of corruption memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap trust in government yang menggunakan variabel GDP sebagai salah satu variabel determinannya. Artinya peningkatan control of corruption secara signifikan akan meningkatkan GDP atau perekonomian.

Hasil berbeda ditemukan Omoteso (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara control of corruption dan real perkapita GDP namun secara signifikansi tidak signifikan mempengaruhi GDP. Artinya peningkatan control of corruption akan menyebabkan tren positif terhadap real per capita GDP namun tidak signifikan. Hal ini juga berarti bahwa adanya isu korupsi tidak memberikan pengaruh terhadap perekonomian.

Pengendalian korupsi merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan hasil estimasi, menunjukkan bahwa pengendalian korupsi berpengaruh signifikan, artinya pemerintah telah membuat kebijakan yang tepat dalam pemberantasan korupsi. Hal ini juga berarti pemerintah di Asia Pasifik dalam pengendalian korupsi yang dilaksanakan melalui kebijakan serta lembaga pemberantasan korupsi telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian.

Di Indonesia, salah satu lembaganya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini bertugas untuk memberantas korupsi serta memeriksa terhadap adanya kemungkinan korupsi oleh individu atau instansi. Lembaga sejenis ini memiliki andil yang besar dalam perekonomian dan membantu pemerintah untuk mengetahui adanya kebocoran dana yang dilakukan oknum tertentu. Semakin ketat dan cermat dalam pemeriksaan oleh lembaga ini, maka pengendalian korupsi akan semakin meningkat dan korupsi dapat ditekan jumlahnya sehingga dapat mengurangi kerugian negara dan berdampak pada meningkatnya perekonomian negara.

Selain Indonesia, negara-negara di Asia Pasifik juga memiliki lembaga pemberantas korupsi seperti Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB), Australia (Independent Commission Against Corruption atau ICAC), Malaysia (Badan Pencegah Rasuah atau BPR), Macau (The Commission Against Corruption atau CCAC), dan Thailand (National Counter Corruption Commission atau NCCC). Control of corruption atau pengendalian korupsi merupakan otoritas pemerintah untuk mengawasi prevalensi korupsi dan penerapan sanksi secara transparan, sehingga warga negara memiliki hak hukum atas semua informasi tentang operasi pemerintah. Korupsi selalu menjadi momok yang menakutkan di berbagai negara dan dengan jumlah yang tak jarang sangat fantastis nominalnya. Apabila korupsi dapat ditekan, hal ini dapat menekan kerugian negara dan dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu peran penting dari institusi pemerintahan sangatlah diperlukan, karena mereka merupakan otoritas yang berwenang dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Pengaruh Political Stability terhadap Perekonomian di Asia Pasifik

Berdasarkan hasil estimasi political stability and absence of violence memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap perekonomian di 11 negara Asia Pasifik. Artinya, semakin tinggi indeks political stability and absence of violence atau semakin stabil keadaan politik dan ketiadaan kekerasan akan meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil estimasi political stability and absence of violence tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Asia Pasifik. Hal ini menunjukkan seberapa besar indeks political stability and absence of violence belum cukup signifikan dalam mempengaruhi perekonomian di Asia Pasifik. Karena wilayah penelitian masih tergolong dalam wilayah yang bebas konflik dan perang, seperti dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, hanya terjadi guncangan politik pada masa pemilihan tersebut tidak menyebabkan konflik berkepanjangan sehingga keadaan perekonomian akan kembali stabil dalam jangka pendek. Kemudian selama terjadinya proses pergantian atau pemilihan pemerintah, meskipun terjadi kerusuhan atau demonstrasi tetapi kegiatan perekonomian dan bisnis masih tetap berlangsung.

Beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia (sebagai contohnya) yaitu peristiwa pemboman (salah satu indikasi absence of violence) gedung di beberapa wilayah. Pemboman tersebut memang berdampak pada ekonomi dalam skala kecil dan sosial, namun untuk perekonomian nasional tidak begitu terlihat. Karena pemerintah atau pihak berwenang mampu mengendalikan situasi dengan cepat dan tanggap sehingga keadaan cepat pulih. Artinya apabila keadaan political stability and absence of violence masih dapat dikendalikan maka perekonomian nasional masih dapat stabil.

Perekonomian akan dipengaruhi political stability apabila pemerintah mencoba untuk merubah sistem pemerintahan dan ekonomi secara sengaja. Dimana kesengajaan ini akan

memicu timbulnya konflik antara pihak yang pro dengan yang kontra terhadap pemerintah. Serta terjadi guncangan dari faktor eksternal, seperti perang dagang yang dilakukan AS-China juga dapat mengakibatkan perekonomian terguncang. Jadi selama political stability and absence of violence terjadi dalam jangka pendek dan terjadi secara natural maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian. Karena stabilitas politik eksternal atau yang terjadi di luar negeri akan lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan stabilitas politik di dalam negeri, sebab jika ada guncangan politik dalam negeri pemerintah dapat dengan cepat menanganinya dengan membuat kebijakan untuk mengatasinya.

Sejalan dengan penelitian Wibowo (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa political stability and absence of violence tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di ASEAN, artinya hal ini menunjukkan bahwa perekonomian juga tidak dipengaruhi secara signifikan oleh political stability and absence of violence. Menurut penelitian ini political stability and absence of violence dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua sasaran yang berdiri masing-masing dan kemajuan yang diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan tidak selamanya berkaitan dengan kemajuan untuk mencapai tujuan yang lainnya.

Hasil penelitian berbeda oleh Omoteso (2014) menyatakan bahwa political Stability and absence of violence memiliki pengaruh positif terhadap real GDP. Artinya semakin kuat political stability and absence of violence maka akan meningkatkan perekonomian. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah harus memperkuat kestabilan politiknya agar perekonomian tidak mengalami guncangan yang disebabkan oleh kacaunya keadaan politik.

Kondisi ini dapat terjadi sebab stabilitas politik tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian dalam jangka pendek, namun apabila terjadi konflik berkepanjangan seperti perang maka akan mengguncang perekonomian. indikator ini juga diukur melalui sisi politik, dimana didalamnya terdapat sejumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk menjaga kestabilan politik disuatu negara. Meskipun dalam penerapannya dapat terjadi penyalahgunaan wewenang namun penyimpangan tersebut hanya berpengaruh terhadap anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga kestabilan politik. Sehingga berapa pun indeks political stability and absence of violence tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian.

Political stability atau kestabilan politik merupakan suatu kondisi yang menggambarkan keadaan politik yang stabil dan damai. Keadaan politik yang bebas dari isu dan motif kejahatan maupun teroris, serta krisis pemerintahan adalah salah satu tujuan utama suatu negara. Secara teori, apabila indeks indikator ini meningkat maka akan meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, political stability and absence of violence, keadaan politik yang stabil dan bebas dari ancaman kekerasan merupakan faktor penting dalam aktivitas ekonomi karena dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Hubungan keduanya yang positif maka dibutuhkan usaha yang lebih, sebab apabila political stability mengalami penurunan maka juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pemerintah harus menjaga dan memperkuat keamanan negaranya sebagai wujud untuk meningkatkan kondisi perekonomian.

Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Perekonomian di Asia Pasifik

Berdasarkan hasil estimasi penerimaan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian di 11 negara Asia Pasifik. Artinya, ketika terjadi peningkatan pada penerimaan pajak suatu negara maka perekonomiannya juga akan meningkat. Berdasarkan hasil estimasi penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian. Hal ini berarti bahwa besar atau kecil perubahan penerimaan pajak akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian di kawasan ini.

Penerimaan pajak merupakan aliran dana dari warga negara yang diterima oleh pemerintah sebagai kas negara. Penerimaan pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi negara. Sehingga penerimaan pajak yang meningkat maka akan memberikan negara pendapatan yang lebih besar, serta dapat digunakan untuk keperluan publik sesuai dengan alokasi yang tepat. Pada saat sekarang ini di beberapa negara menggunakan pajak sebagai salah satu instrumen pendapatan negara terbesar, sama halnya di kawasan Asia Pasifik. Di kawasan ini penerimaan pajak yang banyak menyumbang bagi negaranya bersumber dari pajak terhadap barang dan jasa, pajak penghasilan dan pajak jaminan sosial.

Secara teori, apabila penerimaan pajak meningkat maka akan meningkatkan perekonomian. Sejalan dengan hasil estimasi dan teori, sesuai dengan penelitian Wahyuni (2004) menyatakan bahwa penerimaan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian yaitu ketika penerimaan pajak meningkat maka perekonomian akan meningkat. Maka hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran dalam meningkatkan kegiatan perekonomian terutama dalam memproduksi barang dan jasa sebagai komoditi kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Saragih (2018) yang menemukan bahwa penerimaan pajak tingkat provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Indonesia. Artinya penerimaan pajak memiliki pengaruh yang kuat terhadap perekonomian di Indonesia yang terlihat dari penerimaan pajak provinsi yang meningkatkan produk domestik regional bruto.

Pengaruh Ekspor terhadap Perekonomian di Asia Pasifik

Berdasarkan hasil estimasi ekspor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian di 11 negara Asia Pasifik. Artinya, ketika terjadi peningkatan pada ekspor suatu negara maka perekonomiannya juga akan meningkat. Ekspor merupakan salah satu bentuk dari perdagangan internasional, dimana dengan adanya perdagangan internasional akan saling menguntungkan bagi negara yang terlibat. Ekspor merupakan salah satu cara untuk memindahkan kelebihan output dalam negeri ke negara lain dengan nilai tertentu sehingga dapat memperoleh pendapatan negara. Dengan meningkatnya ekspor maka devisa negara dapat meningkat, devisa negara memiliki banyak manfaat salah satunya untuk membayar utang maupun mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Apabila devisa negara semakin meningkat maka pemerintah tidak perlu khawatir dalam melakukan transaksi internasional, karena devisa sendiri sudah dalam berbentuk mata uang yang berlaku di dunia yaitu Dollar.

David Ricardo menyatakan bahwa perdagangan bebas/internasional merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara, hal ini berarti ekspor merupakan salah satu faktor penting dalam perputaran roda perekonomian suatu negara. Melalui peningkatan ekspor maka dari devisa yang diperoleh dapat digunakan sebagai penunjang aktivitas ekonomi baik nasional maupun internasional. Sehingga ekspor perlu ditingkatkan agar perekonomian dapat berjalan dengan lancar, terutama ekspor barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sejalan dengan hasil penelitian ini, penelitian terdahulu menyatakan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian (Ginting, 2017). Hal ini berarti peningkatan pada ekspor maka akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan produksi yang sedang berlangsung di negaranya dan dapat melihat potensi yang dapat digunakan sebagai komoditi ekspor yang bernilai ekonomi tinggi dan memberikan manfaat finansial yang baik bagi perekonomian negaranya.

Selanjutnya hal serupa dengan yang telah diteliti oleh Pridayanti (2014) yang menemukan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Sebagai negara penganut sistem pasar bebas/internasional menyebabkan perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh seluruh kinerja perdagangan internasional. Dimana hal tersebut

sejalan dengan hasil penelitian tersebut dan hasil penelitian ini, berdasarkan hasil regresi yang berkoefisien positif signifikan. Oleh karena itu, perdagangan internasional tidak dapat dikesampingkan tetapi harus ditingkatkan agar dapat mendorong perekonomian dengan melakukan kerja sama ekonomi atau meningkatkan ekspor barang maupun jasa ke negara lain.

Pengaruh Control of Corruption, Political Stability, Penerimaan Pajak dan Ekspor terhadap Perekonomian di Asia Pasifik

Berdasarkan hasil penelitian control of corruption, political stability, penerimaan pajak dan ekspor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian di Asia Pasifik dengan angka sebesar 99%. Artinya secara bersama-sama variabel bebas memiliki pengaruh sebesar 99% terhadap perekonomian di wilayah tersebut dan 1% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian. Dengan demikian, terjadinya peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik sebagian besar ditentukan oleh control of corruption, political stability, penerimaan pajak dan ekspor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan kesimpulan bahwa secara parsial control of corruption berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian, political stability and absence of violence berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap perekonomian, penerimaan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian, dan ekspor berpengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian di 11 negara Asia Pasifik. Sedangkan secara simultan control of corruption, political stability penerimaan pajak dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di 11 negara Asia Pasifik.

DAFTAR RUJUKAN

- Combey, D. A. (2017). Economic Growth and Political Institutions in the WAEMU: What Do We Know? *European Journal of Business and Management*, 31-35.
- Deliarnov. (2010). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Demarani, F. (2018). The Effect of Government Governance and Tax Ratio to Economic Growth. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Fraj, S. H. (2018). Governance and Economic Growth: The Role of The Exchange Rate Rezime.
- Gaol, M. L. (2016). Pengaruh Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Skripsi*.
- Ginting, A. m. (2017). Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 1-20.
- Gujarati, D. N. (2010). *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gulo, A. (2008). Analisis Pengaruh Aspek Fiskal dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
- Handayani, T. (2016). Good Governance dalam Tata Kelola Perekonomian Memacu pada Pertumbuhan Ekonomi Rakyat. 1-21.
- Jhingan, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kandil, M. (2009). Determinants of Institutional Quality and Their Impact on Economic Growth in The MENA Region. *International Journal of Development*, 134-167.
- Kaufman, D. (2010). Governance Indicator: Where Are We Should We Be Going? *Policy Research Working paper*, 1-43.
- Kim, D.-H. (2017). Heterogeneity in The Effect of Government Size and Governance on Economic Growth. *Economic Modelling*.
- Mankiw, N. G. (2007). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Omoteso, K. (2014). Corruption, Governance and Economic Growth in Sub-Saharan Africa: a need from the prioritisation of reform policies. *Social Responsibility Journal*, 316-330.

- Pridayanti, A. (2014). Pengaruh Ekspor, Impor dan Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2002-2012. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rodrik, D. (2000). Institutions For High Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them.
- Spiteri, J. (2018). Does Good Governance Foster Trust in Government? An Empirical Analysis . *Governance and Regulations' Contemporary Issues*, 121-137.
- Stoilova, D. (2016). Tax Structure and Economic Growth: Evidence from The European Union.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuni, H. (2004). The Role of Government in Economic Growth: Evidence From Asia and Pacific Countries. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 71-81.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Winarno, W. W. (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EvIEWS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yustika, A. E. (2012). *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.